

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bentuk-bentuk pemberdayaan tentunya sangat beragam. Pemberdayaan dalam konteks masyarakat, merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk dengan tujuan menjadikan masyarakat mampu hidup secara mandiri. Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 8 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, pemberdayaan ini dilakukan agar masyarakat berdaya secara mandiri dalam menjalani kehidupannya. Dengan masyarakat yang telah mampu berdaya secara mandiri, diharapkan masyarakat mampu berkontribusi dalam memajukan negara dan membantu negara untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Program-program pemberdayaan ini, tentunya memiliki jenis-jenisnya tersendiri yang bergantung pada kebutuhan daerah tertentu. Pada umumnya, program pemberdayaan berfokus untuk memberikan keterampilan pada setiap individu, agar individu tersebut memiliki nilai jual yang mampu menghasilkan keuntungan bagi kehidupannya. Ada 3 dimensi yang mendasari pengelompokkan pemberdayaan masyarakat, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1
Dimensi dan Indikator Capaian Pemberdayaan Masyarakat

Dimensi	Capaian atas Pemberdayaan
Tingkat Individu	- Kepemilikan modal atau aset - Ketangguhan jasmani - Kebebasan individu - Kemahiran atas hal-hal tertentu - Keberperanan lembaga usaha
Tingkat Kelompok	- Kemampuan merencanakan dan mengambil keputusan - Melaksanakan dan memelihara hasil keputusan bersama - Memanfaatkan hasil-hasil pembangunan
Tingkat Sistem	- Mampu berdaya secara mandiri

Sumber: Diolah peneliti melalui kajian UNDP tentang Capacity Building dalam Beberapa Permasalahan dan Upaya Akselerasi Program Pemberdayaan Masyarakat (2025) (Utomo)

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pemberdayaan memiliki tujuan atau indikator pencapaian yang berbeda-beda tergantung dengan tingkat pemberdayaannya. Dalam tabel tersebut dapat dikaji bahwa pemberdayaan pada tingkat individu memiliki indikator capaian yang paling banyak dibandingkan tingkatan lainnya. Pada dasarnya, pada tingkat individu, fokusnya adalah untuk meningkatkan potensi atau keterampilan yang dimiliki oleh individu. Dengan adanya keterampilan yang dimiliki oleh individu yang mampu menjual dalam masyarakat, maka individu tersebut dinilai telah mampu memberdayakan dirinya dalam lingkungannya. Dalam hal pemberdayaan kelompok, fokusnya adalah untuk bagaimana kelompok tersebut mampu berpartisipasi dalam pembangunan dengan potensi yang mereka miliki. Sementara itu, pada level sistem, pemberdayaan ini berfokus pada meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek.

Pemberdayaan tentunya memiliki tujuan atau pencapaiannya tersendiri, salah satunya ialah menyediakan akses-akses terhadap sumber daya yang lebih terbuka dan luas melalui pengembangan kapasitas masyarakat.¹ Untuk dapat mencapai penyediaan akses-akses terhadap sumber daya yang lebih terbuka, dalam bidang ekonomi, dapat dilakukan atau dibentuk strategi dengan menyediakan modal atau pinjaman serta memberikan subsidi bagi pengusaha-pengusaha yang lemah dalam hal modal². Ini kemudian berkaitan dengan adanya pinjaman modal untuk individu yang ingin membuka usaha tetapi terhalang secara finansial. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penyediaan akses ini adalah adanya program peminjaman dana oleh PNM Mekaar.³ PNM Mekaar atau Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera adalah program yang diinisiasikan oleh Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam pembiayaan atau pendanaan masyarakat. PNM Mekaar berangkat dari adanya permasalahan bahwa banyak masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mendirikan dan mengembangkan UMKM, tetapi terhalang oleh biaya atau modal untuk memulai usaha tersebut.

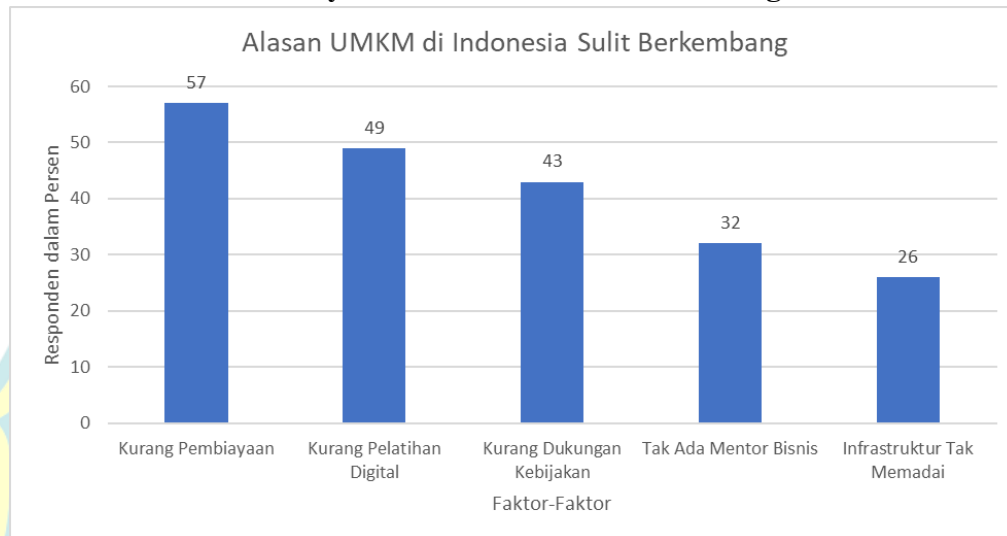
Intelligentia - Dignitas

¹ Tri Widodo W. Utomo, “Beberapa Permasalahan dan Upaya Akselerasi Program Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, volume 1, nomor 1, 2018, hlm 3.

² Ibid, hlm 3.

³ Muhaimin Iskandar (Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI) [@cakiminow], “Program PNM Mekaar adalah salah satu contoh pemberdayaan ekonomi masyarakat”, *Instagram*, 25 Januari 2025, https://www.instagram.com/reel/DFB7RdyT1_m/?igsh=YTkxbnMxczVpdGp2

Bagan 1.1
Faktor-Faktor Penyebab UMKM Sulit Berkembang di Indonesia



Sumber: Data diolah Peneliti melalui Databoks⁴

Hal ini kemudian sejalan dengan hasil survei dari *databoks Indonesia* yang melakukan riset terhadap alasan bisnis UMKM di Indonesia sulit berkembang. Berdasarkan grafik 1.1 tersebut, diperoleh hasil bahwa 57% dari 80 responden (46 orang) menyatakan sulitnya membangun dan mengembangkan bisnis UMKM karena kurangnya dana yang mereka miliki. Padahal dapat dikatakan bahwa modal adalah faktor terpenting dalam sebuah usaha. Terlebih lagi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang pada umumnya berbasis usaha rumahan. Tentunya modal hanya bisa didapatkan dari diri individu itu sendiri. Selain itu, alasan-alasan lainnya juga berkaitan dengan kurangnya keuangan yang dimiliki. Untuk dapat pelatihan melalui mentor bisnis serta melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan, tentunya memiliki dana. Maka bertolak dari hal yang demikian, jelas bahwa diperlukan

⁴ Adi Ahdiat, "5 Kendala Terbesar UMKM Indonesia dalam Melakukan Transformasi Digital", Databoks, Katadata.co.id, diakses pada 13 Januari 2025. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/e212973eac08562/banyak-umkm-belum-bisa-bisnis-online-ini-kendala-utamanya>

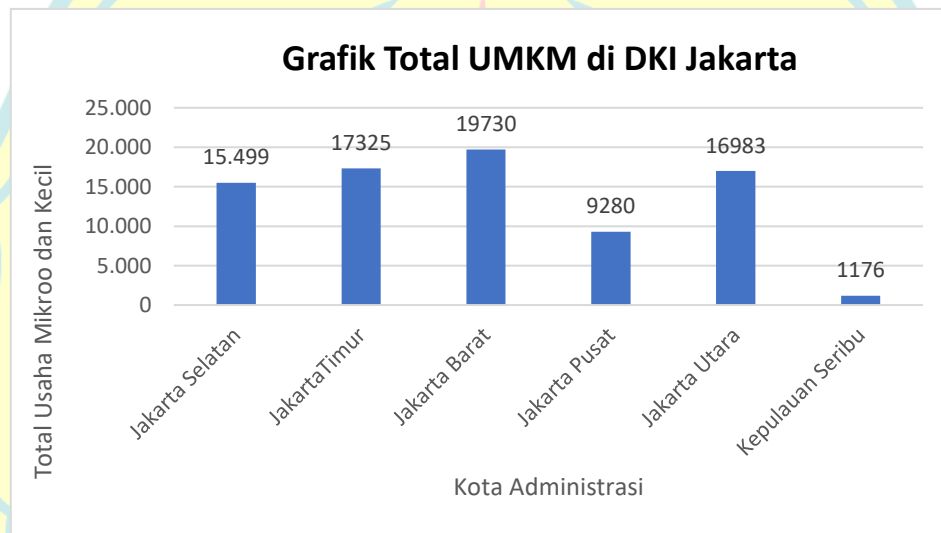
adanya pemberdayaan yang memberikan pinjaman permodalan agar dapat meningkatkan daya usaha masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh PNM ini berfokus pada pemberdayaan kepada para perempuan pra sejahtera. Berdasarkan observasi awal peneliti, PNM Mekaar menilai bahwa perempuan lebih bisa menahan nafsunya untuk menggunakan uang pada hal-hal yang tepat dibandingkan laki-laki. Perempuan dianggap bisa jauh lebih bijak dalam mengelola keuangan dan memprioritaskan keberlangsungan ekonomi keluarga. Disamping itu juga karena sistem pembagian modal secara berkelompok, maka PNM Mekaar memfokuskan usaha ini bagi para perempuan. Hal ini karena para perempuan dinilai akan lebih mudah untuk bersosialisasi dan membuat kelompok dibandingkan dengan para lelaki.

PNM Mekaar memulai cabangnya di beberapa wilayah, yakni di Jakarta, Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat. Namun, kantor pertama PNM Mekaar ini terletak di Cilincing dan Penjaringan Jakarta Utara. Seiring berjalannya waktu, PNM Mekaar mendirikan cabang di setiap kota, salah satunya Kantor Cabang PNM Mekaar Jakarta. Setiap kantor cabang memiliki kantor unitnya tersendiri, yang mana kantor unit ini ditentukan berdasarkan kantor kecamatan-kecamatan di setiap kota administratif di Jakarta. Artinya dari 5 Kota Administratif di Jakarta, terdapat 44 kecamatan di dalamnya. Sehingga dapat diperkirakan terdapat 44 kantor unit PNM Mekaar di daerah Jakarta.

Pemilihan daerah Jakarta Timur sebagai lokasi penelitian juga didasari karena adanya pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi di Jakarta Timur. Fakta tersebut dapat dilihat melalui grafik berikut:

Bagan 1.2
Total UMKM di DKI Jakarta Tahun 2023

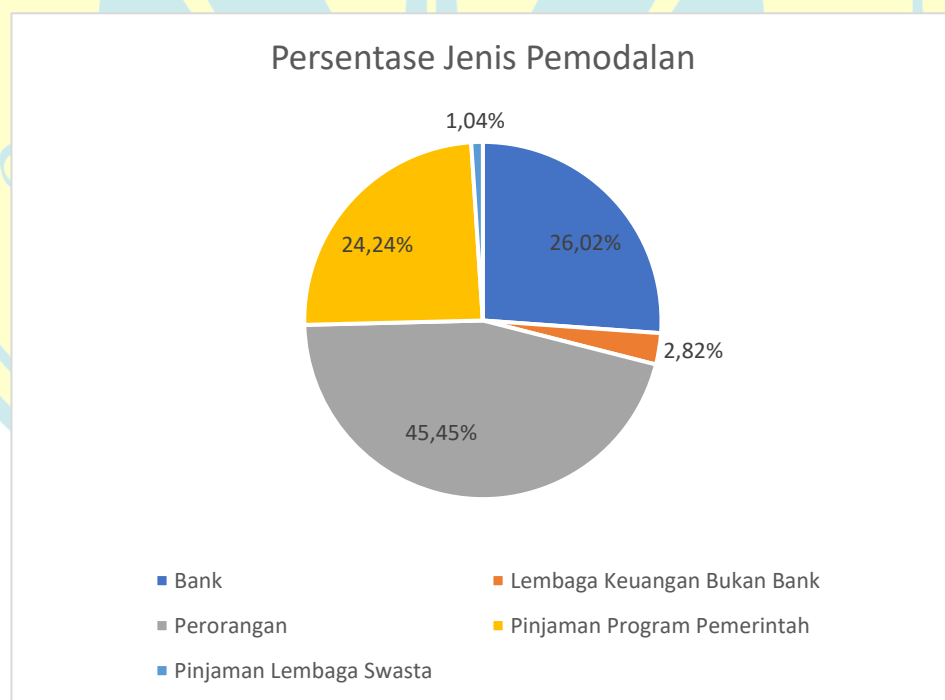


*Sumber: Data diolah Peneliti melalui Buku Digital
Industri Mikro dan Kecil Provinsi DKI Jakarta tahun 2023*

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa Kota Jakarta Barat memiliki total UMKM tertinggi, yakni sebesar 19.370 UMKM. Jumlah ini sejalan dengan fakta wilayah Jakarta Barat yang ramai menjadi pusat perdagangan seperti wilayah Glodok, Asemka, hingga adanya daerah wisata di Taman Sari yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas Jakarta. Kota administrasi dengan pertumbuhan UMKM tertinggi kedua berada di wilayah Jakarta Timur, yakni sebanyak 17.325 UMKM. Pertumbuhan ini mendorong peneliti untuk mendalami keterlibatan PNM Mekaar dalam pertumbuhan UMKM di Jakarta Timur.

Berkaitan dengan itu, peneliti turut menyoroti terkait jenis-jenis modal yang digunakan dalam berwirausaha di Jakarta Timur. Dalam buku digital Industri Menengah dan Kecil di Jakarta Timur, disoroti bahwa permodalan yang menyumbang perkembangan dan pendirian usaha terbagi menjadi beberapa hal, diantaranya adalah berasal dari bank, lembaga keuangan bukan bank, perorangan, pinjaman program pemerintah, dan pinjaman lembaga swasta. Kemudian data ini dapat dituangkan dalam grafik lingkaran berikut.

Bagan 1.3
Jenis Permodalan dalam UMKM di Jakarta Timur



*Sumber: Data diolah Peneliti melalui Buku Digital
Industri Mikro dan Kecil Kota Jakarta Timur 2023*

Dari data ini, permodalan untuk mendirikan usaha paling besar berasal dari perorangan, yakni sebesar 45.45%. Disusul dengan pinjaman dari bank swasta sebesar 26.02%. Kemudian, pinjaman program pemerintah menduduki posisi

ketiga dengan persentase sebesar 24.24%. Artinya, PNM Mekaar sebagai program permodalan yang berasal dari pemerintah turut menyumbang sebesar 24.24% terhadap permodalan di Jakarta Timur. Jika persentase tersebut dikalikan dengan jumlah UMKM di Jakarta Timur pada tahun yang sama, yakni sebesar 17.325 UMKM, artinya PNM Mekaar sudah membantu sekitar 4.201 UMKM di Jakarta Timur.⁵ Hal itu dengan anggapan bawah seluruh pinjaman program pemerintah berasal dari PNM Mekaar. Ini berbeda dengan jenis pemodalan di Jakarta Barat. Bahwa Kota Administrasi Jakarta Barat, meskipun memiliki jumlah UMKM tertinggi di DKI Jakarta, jenis pemodalan yang berasal bukan dari modal pribadi para pengusaha, atau berasal dari pihak lain termasuk didalamnya pinjaman pemerintah, ialah sebesar kurang dari 20%, yakni sebesar 17.01%.⁶

PNM Mekaar tersebar di seluruh Indonesia, sehingga PNM Mekaar terbagi menjadi kantor cabang dan kantor unit. Kantor cabang berada di tingkat kota. Tingkat Kota ini kemudian membawahi tingkat unit, yang dibagi berdasarkan kecamatan. Maka di Jakarta Timur, sedikitnya terdapat 10 kantor unit PNM yang tersebar dari Cakung hingga Pulogadung. Disamping itu, tingkat unit ini akan menaungi kelurahan-kelurahan yang berada dibawah kecamatan tersebut. Di wilayah Jakarta Timur ini, beberapa program PNM Mekaar sudah berjalan sejak tahun 2015, tepat di waktu pertama kali PNM Mekaar berdiri. Hingga tahun 2025

⁵ Badan Pusat Statistik, “*Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi DKI Jakarta [on line].*” (DKI Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta: 2023)

⁶ Anggraeni Primawati, “*Runag Lingkup Perilaku Menyimpang*”, Modul 1 Pembelajaran Sosiologi, hlm 15. Badan Pusat Statistik, “*Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Jakarta Barat 2020-2024*”, (DKI Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta: 2024)

ini, pada salah satu tingkat unit PNM di Jakarta Timur, sudah terdapat lebih dari 6.500 nasabah yang menjadi penerima manfaat program PNM Mekaar.⁷ Pertumbuhannya berlangsung dari tahun ke tahun, sedikitnya 500 sampai 700 pertumbuhan nasabah setiap tahunnya.

Terdapat salah satu unit di Jakarta Timur yang menjadi salah satu PNM Mekaar yang pertumbuhannya pesat. Ini ditandai dengan jumlah nasabah yang lebih dari 5000 nasabah. Jumlah yang banyak ini mendorong PNM Mekaar unit tersebut untuk melakukan pemekaran pada unitnya. Dengan jumlah nasabah yang banyak hingga dilakukannya pemekaran, menjadikan unit ini sebagai unit yang pertumbuhan dan perkembangannya cukup pesat di Jakarta Timur. Peneliti juga menyoroti bagaimana salah satu PNM Mekaar Unit di Jakarta Timur ini dapat memiliki 6500 nasabah, padahal berdasarkan hasil hitung peneliti melalui indikator persentase sumber modal utama UMKM di Jakarta Timur melalui pinjaman program pemerintah terhadap jumlah UMKM di Jakarta Timur, total UMKM yang meminjam modal kepada pinjaman program pemerintah hanyalah sebesar 4.201 UMKM dengan cakupan lokasi se-Jakarta Timur. Jika unit ini sebagai representasi kecamatan tertentu di Jakarta Timur saja sudah mencapai 6.500 nasabah peminjam modal untuk usaha, artinya seharusnya persentase pinjaman modal dan jumlah UMKM di Jakarta Timur meningkat sedikitnya 13%.

Pada mulanya, PNM Mekaar datang dengan mengajak dan menyoroti manfaat dalam bergabung ke PNM Mekaar ini. Bersamaan dengan itu, PNM

⁷ Hasil Wawancara dengan IR Ketua Unit Mekaar, pada 20 Maret 2025, di Kantor Unit Mekaar Salah Satu Wilayah di Jakarta Timur.

Mekaaar memberikan tugas untuk membuat kelompok beranggotakan sedikitnya 6 orang dan paling banyak 30 orang dengan seorang ketua didalamnya. Lama kelamaan, dari informasi yang terus menyebar mengenai program ini, semakin banyak warga yang tertarik untuk bergabung menjadi nasabah PNM Mekaaar. Adapun kelompok di unit ini mencapai lebih dari 150 kelompok. Tentunya jumlah ini adalah akumulasi dari tahun ke tahun. Setiap kelompok memiliki ketua dan wakil ketuanya masing-masing. Ketua dan wakil ketua berperan sebagai orang yang akan bertanggung jawab dalam mengemban angsuran kelompok. Nantinya, ketua kelompok dan wakil ketua kelompok akan menyerahkannya kepada petugas atau *account officer* dari PNM Mekaaar.

Banyak diantara mereka yang memilih menjadi nasabah PNM Mekaaar karena beberapa hal, diantaranya karena sistem angsuran dengan biaya balas jasa yang kecil dan biaya angsuran yang rendah. Biaya angsuran ini ditetapkan *flat* atau selalu sama setiap minggunya. Bahkan tidak jarang dapat mengangsur semampunya, dengan syarat membayar kekurangan angsuran tersebut pada waktu berikutnya. Ini tentunya memberikan kemudahan bagi para nasabah. Hanya saja, dalam program PNM Mekaaar pada salah satu unit di Jakarta Timur ini, masih terdapat kejanggalan dalam pelaksanaannya. Ada perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi dalam proses pengajuan dana untuk modal usaha hingga pencairan dana.

Penyimpangan ini tentunya menyoroti perilaku antara nasabah dan juga petugas PNM Mekaaar yang bertugas atau disebut juga *account officer*. Perilaku menyimpang disini ditekankan pada adanya perilaku yang tidak sesuai dengan

persyaratan-persyaratan dan melanggar kesepakatan antara nasabah dengan pihak PNM Mekaar dan antara realitas kinerja petugas pemberdayaan dengan kode etik petugas. Berdasarkan observasi awal peneliti, penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah terdiri dari penggunaan nama orang lain sebagai nasabah, menyalahgunakan dana, tidak melaksanakan pertemuan mingguan, serta memalsukan proposal usaha. Padahal ini melanggar persyaratan dari PNM Mekaar itu sendiri yang mengharuskan adanya kehadiran atas pertemuan kelompok mingguan serta adanya ketentuan bahwa modal usaha digunakan untuk usaha yang sudah direncanakan dan sudah memiliki usaha. Sementara itu, perilaku menyimpang dari sisi petugas dilihat dari sikap petugas yang mengetahui hal ini terjadi tetapi memilih untuk membiarkannya demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yakni tercapainya target harian dan bonus atas hal tersebut.

Perilaku menyimpang di kalangan nasabah nampak dibiarkan oleh petugas. Contohnya, ketika nasabah memalsukan proposal pengajuan dana yang berisikan rincian penggunaan dana yang akan dipinjamkan, seperti pembelian alat-alat penunjang usaha yang dilampirkan besaran taksiran harganya. Namun, proposal tersebut justru dibiarkan dan tidak dilakukan pengecekan terkait benar atau salahnya. Tidak hanya itu, pada kasus peminjaman dana ini, seringkali nasabah diperalat untuk menjadi perantara orang lain untuk memanfaatkan dana pinjaman. Namun, petugas menyatakan bahwa siapapun yang menggunakan dana itu, tetaplah identitas nasabah yang terdaftar yang akan menjadi penanggung jawab peminjaman dana ini.

Perilaku menyimpang lainnya terletak pada penggunaan dana. Keuntungan yang diberikan oleh PNM Mekaar ini ternyata tidak digunakan dengan baik. Dari beberapa kelompok tersebut, dikatakan tidak seluruhnya yang benar-benar menggunakan uang modal tersebut untuk berwirausaha, yakni membuka usaha warung sembako yang sederhana. Sementara lainnya menggunakannya untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Contohnya, digunakan untuk keperluan biaya SPP sekolah dan atau untuk biaya hidup sehari-hari. Dengan kata lain, modal ini tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Padahal jelas bahwa tujuan program ini adalah untuk menyejahterakan masyarakat melalui permodalan usaha, tetapi pelaksanaannya menyimpang dari tujuan tersebut. Jika dipergunakan dengan baik, padahal program ini akan sangat membantu keberlangsungan hidup masyarakat dan menuntun masyarakat menuju kemandirian finansial. Sekurang-kurangnya, dapat membuahkan penghasilan atas usaha yang mereka geluti. Namun faktanya, dana yang digunakan untuk produktif ini justru digunakan untuk konsumtif. Padahal, sesuai yang terdapat pada laman PNM Mekaar, program ini dibuat untuk memberikan manfaat, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga melalui kewirausahaan dan pengelolaan keuangan dengan pembiayaan tanpa agunan.

Selain itu, penggunaan dana yang tidak semestinya ini juga diketahui oleh petugas PNM Mekaar atau *account officer* PNM Mekaar yang bertugas di wilayah tersebut. Hanya saja, mereka tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Selain itu juga mereka menyatakan bahwa pihak cabang tidak mengetahui adanya praktik ini.

Ini sangat bertentangan dengan pelaksanaan program Mekaar yang menyatakan bahwa para nasabah wajib memiliki usaha setelah diberikan pembiayaan.

Adanya permasalahan yang demikian, membuat peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam terkait program PNM Mekaar ini. Hal ini karena artinya terdapat kesenjangan antara peruntukkan program dengan sebagaimana yang terjadi dilapangan. Terlebih lagi, perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para nasabah ini telah diketahui oleh *accout officer* atau petugas PNM Mekaar yang bertugas untuk menarik uang angsuran dari para nasabah. Artinya, kedua pihak dalam pelaksanaan program PNM Mekaar ini sama-sama menunjukkan perilaku menyimpang demi mendapatkan keuntungan pribadi. Maka dari itu, peneliti ingin membahas dan mendeskripsikan lebih dalam terkait adanya penyimpangan penggunaan dana ini.

Disamping itu, peneliti mendalami bahwasanya program pemberdayaan adalah sebuah program yang seharusnya mendorong kemandirian masyarakat, sebagaimana tujuan utama dari program pemberdayaan itu sendiri. Namun, jika perilaku-perilaku yang demikian tidak segera dibenahi, maka program pemberdayaan tidak akan mencapai efektivitas program. Ditambah lagi, program pemberdayaan seperti PNM Mekaar yang memberikan bantuan peminjaman modal, jika tidak digunakan semestinya, tentunya akan melahirkan permasalahan-permasalahan lain, seperti praktik budaya utang piutang berserta masalah yang timbul didalamnya.

Padahal, ditengah perkembangan zaman ini, permodalan UMKM menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, karena dapat melahirkan kemandirian ekonomi

dan sedikitnya membantu bangsa ini selamat dari krisis ekonomi dan tingginya angka pengangguran. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan mampu membantu adanya perilaku menyimpang yang terjadi dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat berbasis permodalan. Dengan harapan, penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk perbaikan dan pengawasan program. Sehingga program benar-benar dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia.

1.2 Permasalahan Penelitian

Program pemberdayaan masyarakat dapat berbentuk berbeda-beda tergantung kebutuhan setiap daerah. Pada dasarnya program pemberdayaan masyarakat berfokus pada pengembangan kapasitas individu atau kelompok agar dapat berdaya dan hidup secara mandiri. Salah satu bentuk pemberdayaan dapat pula peminjaman modal untuk para pelaku usaha. Peminjaman dana yang diperuntukan bagi modal usaha terjadi karena melihat adanya potensi dalam masyarakat untuk berwirausaha tetapi terkendala modal untuk memulai usaha. Untuk mendukung terealisasinya kegiatan berwirausaha tersebut, maka dibantulah melalui pemberian modal usaha. Salah satu program yang bergerak dalam hal demikian adalah program milik PT. Permodalan Nasional Madani yang bernama PNM Mekaar. Program ini berfokus pada pemberian pinjaman dana tanpa adanya agunan, sehingga dapat menyasar para calon pelaku usaha yang terkendala oleh modal dan tidak memiliki agunan untuk meminjam dana.

Namun, kenyataannya, terdapat perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi dalam pelaksanaan program ini. Terdapat kesenjangan antara peruntukan program dengan pelaksanaannya, seperti menggunakan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diluar pendirian usaha, pemalsuan berkas, pemalsuan bentuk usaha, dan menggunakan data diri orang lain sebagai peminjam. Tidak hanya bermasalah dari sisi nasabah, petugas juga kerap melakukan perilaku menyimpang, yakni mengetahui tetapi mengabaikan perilaku yang dilakukan oleh para nasabah. Justru, dorongan penyimpangan oleh nasabah terkadang berasal dari petugas itu sendiri. Peristiwa perilaku menyimpang tersebut salah satunya terjadi di tingkat unit pada salah satu PNM Mekaar unit di Jakarta Timur. Sehingga penelitian ini berusaha mendeskripsikan adanya perilaku menyimpang dalam pelaksanaan program PNM Mekaar tersebut. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perilaku menyimpang pada salah satu program PNM Mekaar tingkat unit di Jakarta Timur?
2. Bagaimana analisis bentuk perilaku menyimpang yang terjadi melalui perspektif kontrol sosial Travis Hirshci dalam program PNM Mekaar pada salah satu unit di Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dipaparkan pada sub bab permasalahan penelitian, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan terjadinya bentuk perilaku menyimpang pada salah satu program PNM Mekaar tingkat unit di Jakarta Timur.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan analisis bentuk perilaku menyimpang yang terjadi melalui perspektif kontrol sosial Travis Hirschi dalam program PNM Mekaar pada salah satu unit di Jakarta Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian dan penulisan yang dilakukan ini dapat memberikan dampak positif bagi para pembacanya, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan turut mengembangkan pengetahuan, mampu berperan sebagai sumber informasi, dan memperkaya referensi bagi para peneliti dengan penelitian sejenis, khususnya pada ranah sosiologi. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pemahaman mengenai topik yang dibahas, yakni mengenai adanya perilaku menyimpang dalam sebuah program pemberdayaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam kaitannya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi pemilik modal

terkait, yakni PT. Permodalan Nasional Madani untuk menindaklanjuti adanya kesenjangan antara tujuan dan kenyataan di lapangan program PNM Mekaar.

Selain itu, agar penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah pusat ataupun daerah yang berwenang untuk mampu mengevaluasi program ini, khususnya dalam pelaksanaan dan keberlanjutan program. Hal ini karena dapat dikatakan bahwa program menjadi sia-sia karena tidak membuahkan hasil sebagaimana tujuannya. Disamping itu, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi para lembaga keuangan lain untuk memberikan sistem pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan terawasi.

1.5 Tinjauan Literatur

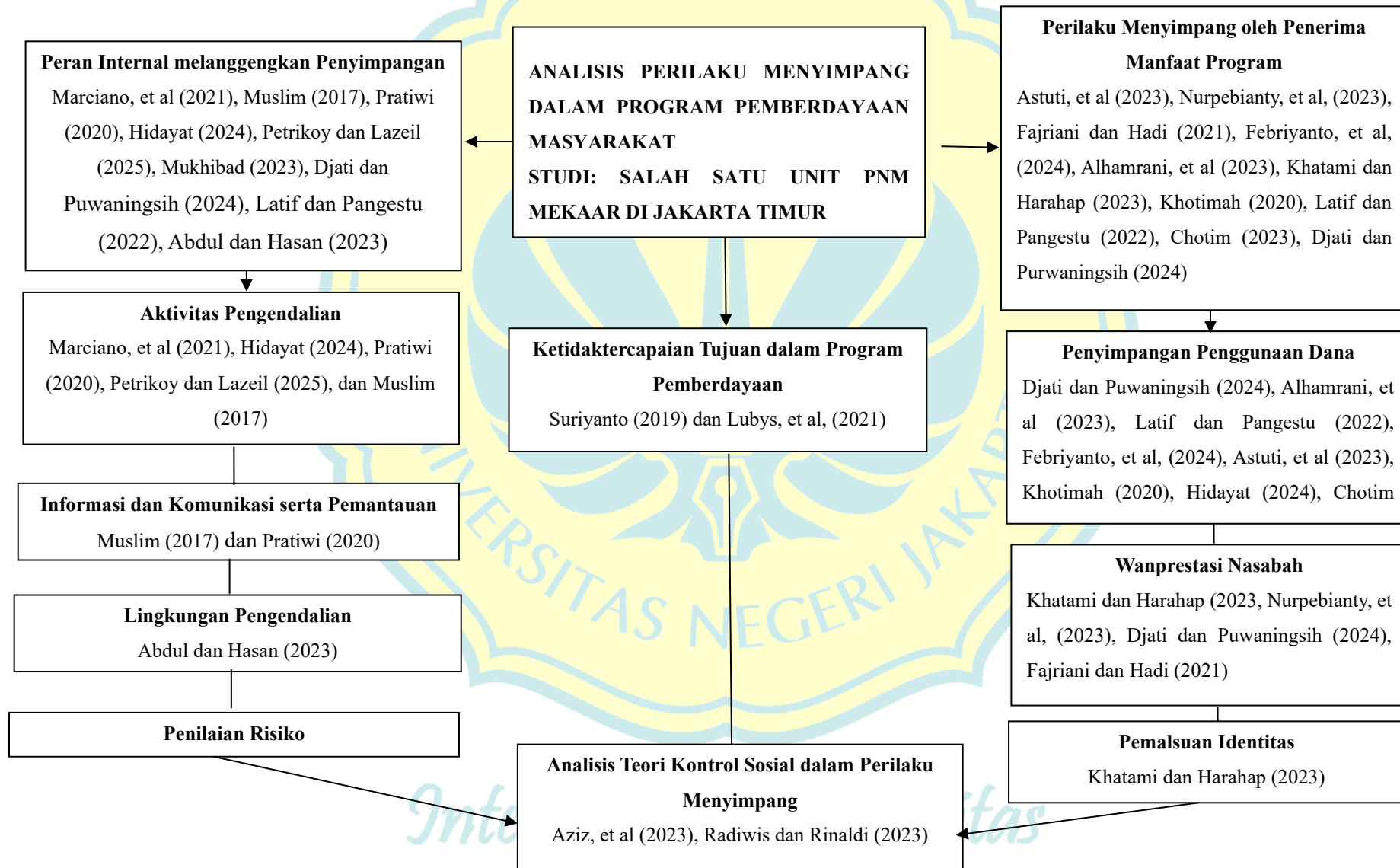
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti lain. Penelitian-penelitian terdahulu sebagai alat bantu bagi peneliti dalam menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada dan merincikan gagasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini. Pada bagian ini, peneliti akan menuliskan dan merangkum berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang didalamnya terjadi penyimpangan, baik yang dilakukan oleh petugas pemberdayaan maupun yang dilakukan oleh penerima manfaat program. Perilaku menyimpang disini dimaknai sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan kesepakatan yang dibuat oleh penyedia program dan tertulis dalam ketentuan dan

aturan program. Berikut akan dijelaskan secara rinci penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema dan topik yang penulis teliti.



Intelligentia - Dignitas

Skema 1.1
Pengelompokan Tinjauan Literatur



Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti lain. Penelitian-penelitian terdahulu sebagai alat bantu bagi peneliti dalam menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada dan merincikan gagasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini. Pada bagian ini, peneliti akan menuliskan dan merangkum berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu “Analisis Perilaku Menyimpang Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Studi Pada Salah Satu Unit PNM Mekaar Di Jakarta Timur”. Pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk membagi tinjauan literatur menjadi beberapa bagian, diantaranya analisis peranan internal dalam mendorong perilaku menyimpang, perilaku menyimpang dalam program pemberdayaan masyarakat, ketidaktercapaian tujuan dalam program pemberdayaan masyarakat, serta analisis teori kontrol sosial dalam perilaku menyimpang.

Analisis tinjauan literatur dalam penelitian ini juga peneliti fokuskan pada pengendalian internal dalam sebuah sistem. Peranan internal dalam sebuah program dimaknai sebagai keterlibatan orang-orang yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program. Peneliti menyoroti bagaimana peranan internal justru dapat melanggengkan penyimpangan, beberapa literatur yang membahas peranan internal dalam melanggengkan penyimpangan diperoleh dalam jurnal-jurnal berikut. Diantaranya adalah Marciano, et al (2021), Muslim (2017), Pratiwi (2020), Hidayat (2024), Petrikoy dan Lazeil (2025), Mukhibad (2023), Djati dan Puwaningsih (2024), Latif dan Pangestu (2022), Abdul dan Hasan (2023). Dalam jurnal-jurnal ini, menyebutkan bahwa pengendalian internal

yang baik akan berperan dalam keefektifan organisasi, salah satunya adalah mencegah terjadinya kecurangan. Peranan pengendalian internal ini terbagi menjadi beberapa elemen, diantaranya adalah struktur organisasi yang memisahkan akuntabilitas dan kewenangan, sistem organisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, serta karyawan yang kinerjanya sesuai dengan kewajibannya. Sementara itu, terdapat lima elemen lainnya yakni lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*) serta pemantauan (*monitoring*).

Pengendalian internal yang baik mengacu pada terpenuhinya elemen-elemen pengendalian internal. Sehingga pihak-pihak internal dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi program ataupun organisasi. Dalam kasus PNM Mekaar yang peneliti tengah teliti, lemahnya pengendalian internal menjadi salah satu alasan perilaku menyimpang masih terus berlanjut. Khususnya dalam hal karyawan yang kinerjanya sesuai dengan kewajibannya, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Kinerja yang dilakukan oleh para petugas pemberdaya memanglah sudah sesuai kewajibannya, hanya saja mengabaikan etika dan profesionalisme pekerja. Begitupun dalam aktivitas pengendalian dan pemantauan, tidak ada lanjutan pemantauan atas penggunaan dana para nasabah sehingga berdampak pada adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan nasabah terutama dalam hal penggunaan dana.

Tinjauan literatur selanjutnya berkaitan dengan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh penerima manfaat program. Penelitian-penelitian terdahulu yang

membahas mengenai perilaku menyimpang penerima manfaat program pemberdayaan diantaranya adalah Astuti, et al (2023), Nurpebianty, et al, (2023), Fajriani dan Hadi (2021), Febriyanto, et al, (2024), Alhamrani, et al (2023), Khatami dan Harahap (2023), Khotimah (2020), Latif dan Pangestu (2022), Chotim (2023), Djati dan Purwaningsih (2024). Penelitian-penelitian tersebut menyoroti beberapa progra, diantaranya program PNM Mekaar, program KJP pada perkuliahan, serta pada dana zakat. Perilaku menyimpang yang paling umum terjadi ialah adanya penyimpangan penggunaan dana, pada dasarnya penelitian-penelitian tersebut menyoroti adanya ketidaksesuaian pemnafaatan dana program. Dana yan seharusnya digunakan untuk kebutuhan produktif justru dihamburkan untuk keinginan. Sementara itu, khusus dalam program PNM Mekaar, terdapat beberapa perilaku menyimpang lainnya, seperi wanprestasi nasabah dan pemalsuan identitas.

Pada program PNM Mekaar, perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi didasari karena adanya kekosongan pernanan internal didalamnya, seperti halnya yang dijabarkan dalam penelitian oleh Hidayat (2024). Perilaku menyimpang seperti wanprestasi yang terjadi pada PNM Mekaar diteliti oleh Khatami dan Harahap (2023, Nurpebianty, et al, (2023), Djati dan Puwaningsih (2024), Fajriani dan Hadi (2021). Bentuk-bentuk wanprestasinya ialah ketidakikutsertaan dalam tanggung renteng serta pertemuan kelompok mingguan sebagaimana telah disepakati pada awal program berjalan. Sementarai itu, pemalsuan identitas dituangkan dalam jurnal Khatami dan Harahap (2023) yang membahas adanya

penggunaan KTP orang lain dalam pengajuan pinjaman di PNM Mekaar. Ini justru menunjukkan lemahnya pengawasan dan pemantauan oleh petugas pemberdayaan.

Disamping jurnal-jurnal tersebut, peneliti juga menyoroti adanya ketidaktercapaian tujuan dalam program pemberdayaan, yakni melalui penelitian oleh Suriyanto (2019) dan Lubys, et al, (2021). Penelitian yang dilakukan oleh Suriyanto (2019) menggunakan indikator keberhasilan yang diberikan oleh Sumodiningrat, diantaranya adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan, meningkatkan kemandirian kelompok, dan meningkatnya kapasitas masyarakat. Sementara itu, penelitian Lubys, et al, (2021) berfokus pada keberdayaan masyarakat. Penelitian ini menyoroti bagaimana pemerintah tidak benar-benar memberikan pelatihan dan sosialisasi dalam peningkatan kapasitas, sehingga pemberdayaan menjadi sia-sia.

Dalam hal penggunaan teori kontrol sosial, peneliti berfokus pada jurnal Aziz, et al (2023), Radiwis dan Rinaldi (2023). Jurnal-jurnal ini membahas adanya perilaku menyimpang, yang terjadi pada remaja, terjadi karena adanya kekosongan kontrol yang terjadi dalam kelompok atau lingkungan masyarakat. Bahwasanya kontrol berperan dalam memberikan arahan dalam berperilaku agar tidak menyimpang atau konformitas. Selain itu, dalam kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi juga terdapat 4 elemen yang berperan dalam memberikan kontrol pada masyarakat.

Berdasarkan jurnal-jurnal yang telah ditelaah oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwasanya beberapa penelitian yang berfokus pada program

pemberdayaan masyarakat, khususnya pada program PNM Mekaar, kebanyakan meneliti secara terpisah antara pengendalian internal yang lemah serta perilaku menyimpang yang dilakukan oleh nasabah. Beberapa penelitian yang membahas mengenai perilaku menyimpang pada PNM Mekaar juga dibahas dari sisi atau sudut pandang hukum, bahwa terdapat perilaku-perilaku menyimpang yang tidak hanya melanggar kesepakatan melainkan juga melanggar hukum-hukum yang tertulis, berikut dengan sanksi-sanksinya.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Analisis Perilaku Menyimpang pada Program Pemberdayaan Masyarakat Studi: Unit PNM Mekaar di Jakarta Timur” berupaya untuk mengisi kekosongan penelitian yang tidak menggabungkan dua sisi, yakni dari sisi pemberdaya dan dari sisi yang diberdayakan. Peneliti berupaya untuk menggali keduanya sebagai bagian dari perilaku menyimpang. Dengan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas adanya perilaku menyimpang oleh program pemberdayaan dan adanya penelitian mengenai peranan internal dalam melanggengkan perilaku penyimpangan, maka penelitian ini berupaya untuk menggabungkan kedua hal tersebut. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai kedua hal ini menelaah perilaku menyimpang sebagai bentuk pelanggaran atas hukum serta akibat hukum yang mengikuti perilaku menyimpang itu. Sementara itu, penelitian dengan judul “Analisis Perilaku Menyimpang pada Program Pemberdayaan Masyarakat Studi: Unit PNM Mekaar di Jakarta Timur” berfokus untuk menganalisis perilaku tersebut dari sudut pandang sosiologis, khususnya melalui analisis teori kontrol sosial.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Perilaku Menyimpang

Penyimpangan berasal dari kata menyimpang, yang mana jika dikaitkan dengan tingkah laku, maka menurut Andi Mappiare menyimpang berarti tingkah laku yang bermasalah.⁸ Sementara itu, menurut Menurut M. Gold dan J. Petronio, perilaku menyimpang dimaknai sebagai tindakan yang sengaja melanggar hukum dan diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman. Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai sebuah tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan individu atas lingkungannya yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada dalam masyarakat.⁹ Diartikan pula sebagai sesuatu yang tidak menurut apa yang sudah ditentukan dan sebagai sesuatu yang menyalahi kebiasaan.

Menurut J. Dwi Narwoko, bahwa suatu perilaku juga dapat dikatakan menyimpang apabila tindakan tersebut *non-conform*, antisosial, atau tindakan-tindakan kriminal.¹⁰ Tindakan kriminal disini yakni sebuah tindakan tersebut secara nyata telah melanggar aturan hukum yang tertulis dan dapat mengancam orang lain. Kemudian Soerjono Soekanto mendefinisikan perilaku menyimpang disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial.¹¹ Penyakit

⁸ Aris Owen Aldaro, Binsar Tison Gultom, dan Benjamin Albert Simamora, “Hubungan Perilaku Negatif (Menyimpang) Siswa Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas Xi Di Taman Madya (SMA) Taman Siswa Pematangsiantar” Jurnal Sains Student Research, Vol. 2 No.5, Tahun 2024, hlm 7.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://kbbi.web.id/perilakumenyimpang>, diakses pada 31 Januari 2025

¹⁰ Suardi, *Sosiologi Komunitas Menyimpang*, volume 1, (Yogyakarta: Penerbit Writing Revolution: 2018), hlm 7.

¹¹ Maslina Daulay, “Bimbingan Konseling Islam Bagi Perilaku Menyimpang”, Jurnal Fitrah, Volume 08, Nomor 1, 2024, hlm 53.

masyarakat disini dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dan melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola perilaku yang umum. Sementara itu, Anggraeni Primawati menyatakan bahwasanya perilaku menyimpang merupakan tingkah laku yang tidak sejalan atau tidak menaati aturan normatif, maupun tingkah laku yang bertolak belakang dengan harapan-harapan yang ada di lingkungan sosial yang bersangkutan.¹² Namun, yang paling dasar mengenai perilaku menyimpang ialah bahwa perilaku tersebut merupakan berbagai bentuk yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesuatu perilaku dikatakan menyimpang apabila perilaku tersebut bermasalah karena telah menyalahi aturan-aturan yang berlaku.

Sementara itu, J Dwi Narwoko & Bagong Suyanto juga menyatakan bahwa perilaku menyimpang dapat digolongkan menjadi tiga, diantaranya sebagai berikut. **Pertama**, bahwa perilaku menyimpang merupakan sebuah tindakan yang *non-conform*, yakni sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma dalam masyarakat. Disini konformitas adalah upaya untuk menerima baik tujuan budaya yang diterapkan, sehingga seseorang akan berperilaku sebagaimana aturan atau harapan kelompok yang ada. **Kedua**, tindakan yang anti sosial atau asosial, dinaknai sebagai tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Seperti tidak mau bergaul, terlibat dalam

¹² Anggraeni Primawati, “*Runag Lingkup Perilaku Menyimpang*”, Modul 1 Pembelajaran Sosiologi, hlm 15.

prostitusi, pelacuran, dan atau penyimpangan seksual. **Ketiga**, tindakan kriminal, yakni tindakan yang secara nyata melanggar hukum tertulis dan dapat mengancam jiwa ataupun keselamatan orang dan atau masyarakat.

Walaupun demikian, penyimpangan tidak selalu berkonotasi ke arah negatif. Penyimpangan yang positif misalnya adanya wanita karier dan pendidikan yang dilihat sebagai sesuatu yang tidak lazim tetapi berdampak positif bagi kehidupan. Sementara penyimpangan bersifat negatif yakni jika dianggap rendah dan dapat menimbulkan kekacauan-kekacauan baru di dalamnya. Dalam hal jenis, penyimpangan memiliki banyak jenisnya, menurut Suwarniyati Sartono, penyimpangan dapat terbagi menjadi penyimpangan seksual seperti perzinahan, hubungan seksual di luar nikah, pemerkosaan, dan homoseksualitas, alkoholisme, tindakan kriminal atau tindakan kejahatan, dan penyimpangan dalam gaya hidup yang lain dari biasanya seperti sikap arogansi (kesombongan) dan sikap eksentrik.¹³

Dalam sebuah program pemberdayaan yang didalamnya terdapat sebuah kecurangan-kecurangan, ini dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau tindakan kejahatan. Hal ini karena telah melanggar norma-norma hukum terkait kesepakatan yang telah diterapkan. Norma hukum termasuk didalamnya peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak hanya melanggar norma hukum, perilaku menyimpang dalam

¹³ Daulay, Op.Cit. hlm 17.

program pemberdayaan ini juga telah melanggar norma moral atau kesusilaan, karena telah melakukan penipuan atas pemanfaatan program pemberdayaan tersebut.

Sementara itu, menurut Eriyadi, jenis-jenis perilaku menyimpang dapat diidentifikasi berdasarkan sifat dan pelakunya.¹⁴ Jenis penyimpangan berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi dua, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penyimpangan primer, yakni penyimpangan yang bersifat sementara atau temporal. Misalnya, seseorang yang tidak tertib lalu lintas, siswa yang bolos sekolah, dan atau seseorang yang menunda membayar pajak.
- b. Penyimpangan sekunder, yakni penyimpangan yang nyata dan sering terjadi, sehingga akibatnya cukup parah dan meruhkan orang lain. Misalnya mabuk-mabukan, pembegalan, dan pencurian.

Kemudian, perilaku menyimpang berdasarkan pelakunya, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Penyimpangan individual, yakni penyimpangan yang dilakukan oleh individu tertentu terhadap norma-norma yang ada. Misalnya seseorang yang melakukan pencurian dan pembegalan sendiri. Berdasarkan kadarnya, perilaku menyimpang individual ini terbagi menjadi pembandel karena ketidakpatuhan atas nasihat, pembangkang karena

¹⁴ Eriyadi, Intisari Pengetahuan Sosial Lengkap SMP, (Ciganjur : PT Kawan Pustaka, 2007), hlm. 395-396.

ketidaktaatan peringatan orang-orang, pelanggar karena melanggar norma-norma umum dalam masyarakat, perusuh atau penjahat atas pengabaian norma-norma dan aturan yang mengakibatkan kerugian harta benda atau jiwa, dan munafik yakni ketidaktepatan janji, berkata bohong, mengkhianati kepercayaan dan berlagak membela.¹⁵

- b. Penyimpangan kelompok, yakni penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang atas norma-norma atau aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Biasanya dilakukan oleh sub-kelompok tertentu, seperti komplotan begal dan sebagainya.

Selain itu, perilaku menyimpang juga dapat dikritisi dalam hal penyebab terjadinya. Menurut Wilnes dalam "*Punishment and Reformation*" sebab-sebab terjadinya kejahatan atau penyimpangan dapat dibagi menjadi dua faktor, yakni faktor objektif dan faktor subjektif.¹⁶ Faktor subjektif berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri dan sifat-sifat bawaan sejak seseorang itu lahir. Hal inilah yang membuat seseorang dikatakan sebagai penyimpang dan dapat mendorong seseorang untuk melakukan penyimpangan. Sementara itu, faktor objektif merupakan kebalikannya, yakni berasal dari lingkungan individu tersebut. Faktor objektif ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketidaksanggupan dalam menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kepribadiannya. Sehingga tidak dapat membedakan mana yang pantas dan tidak pantas.

¹⁵ Suardi, Op.Cit, hlm 16.

¹⁶ Daulay, Op.Cit, hlm 11.

2. Proses belajar yang menyimpang, yakni apabila sering melihat tentang perilaku menyimpang, maka dapat menyebabkan individu juga melakukan apa yang dilihat dan dipahaminya tersebut. Dapat dicontohkan pula dengan melakukan kecurangan-kecurangan kecil dalam mengelola uang lembaga atau instansi yang lama kelamaan semakin berani menggunakan berbagai strategi yang rapi.
3. Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial, yakni ketika seseorang tidak dapat mencapai tujuan karena tidak adanya peluang. Misalnya melakukan penipuan-penipuan atau pemalsuan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya meskipun dengan cara yang tidak benar.¹⁷
4. Adanya ikatan sosial yang berlainan, yakni berkaitan dengan pergaulan individu tersebut. Apabila individu tersebut bergaul dengan kelompok-kelompok yang berperilaku menyimpang, maka akan memungkinkan seseorang tersebut mencontoh pola perilaku menyimpang ini.
5. Akibat proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang, yakni adanya tayangan media massa tentang perilaku-perilaku menyimpang tersebut yang lama kelamaan akan dianggap wajar atau biasa dan boleh dilakukan.

Berdasarkan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan ini, maka dapat disimpulkan bahwa penyimpangan yang terjadi

¹⁷ Ibid, hlm 12.

pada program PNM Mekaar, baik yang dilakukan oleh para penerima manfaat maupun para petugas pemberdaya, dapat diidentifikasi terjadi karena adanya faktor dalam diri sendiri maupun faktor lingkungan sekitar yang mendorong terjadinya penyimpangan ini. Faktor dalam diri sendiri dapat berkaitan dengan keinginan-keinginan untuk memperoleh keuntungan diluar pemikiran benar dan salah. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan adanya pengaruh-pengaruh dari lingkungan yang didukung adanya kesempatan untuk melakukan penyimpangan tersebut.

1.6.2 Pemberdayaan Masyarakat

Dalam meningkatkan taraf hidup seseorang atau kelompok dalam masyarakat agar menjadi lebih baik, maka dapat dilakukan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai suatu pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjeknya. Ini juga sebagai syarat pemberdayaan masyarakat, agar diperoleh ketepatan solusi dan keandalan dari cara-cara pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat ini muncul karena beberapa masalah dalam masyarakat, seperti masalah kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan, ketidakadilan, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakberdayaan.¹⁸ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang dilakukan dalam membangun masyarakat

¹⁸ Afriansyah dkk, *Pemberdayaan Masyarakat* vol.1, (Padang: PT. Global Ekskeutif Teknologi: 2022), hlm 13.

sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁹

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk membangun masyarakat, pada dasarnya tidak hanya menekankan pada tujuan, melainkan juga pada proses. Bertumpu pada tujuan, maka pemberdayaan masyarakat menekankan pada hasil atau ketercapaian dari sasaran yang telah ditetapkan pada awal program. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberikan kekuatan bagi masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Keberdayaan ini dapat dilihat dari kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, adanya pengetahuan ataupun kekuasaan, memiliki kepercayaan diri dalam lingkungan sosial, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam kehidupannya.²⁰ Sementara itu, pemberdayaan sebagai sebuah proses dapat dilihat dari rangkaian-rangkaian kegiatan yang diterapkan dalam program tersebut. Rangkaian kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat ini didefinisikan sebagai sebuah tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah

¹⁹ Database Peraturan BPK, "Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7A Tahun 2007", diakses pada 31 Januari 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/>

²⁰ Marianne Voges. "Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan di Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang." *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, volume 3, no. 1, 2016, hlm 2.

sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki.²¹ Sementara menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian dukungan untuk memperluas akses kehidupan melalui peningkatan kemampuan guna mendorong kemandirian yang berkelanjutan terhadap masyarakat.²² Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses meningkatkan atau membangun kualitas dalam diri manusia melalui penggalian dan pengembangan kemampuan individu atau kelompok dalam hal kreativitas, kemandirian, kompetensi, daya pikir, serta tindakan-tindakan yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

Pemberdayaan pada dasarnya memberikan kesempatan untuk individu dan atau kelompok agar dapat hidup sejahtera. Pemberdayaan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek lainnya, meliputi sosial, budaya, serta hak-hak politik masyarakat seperti dalam bersuara atau berpendapat. Ini sejalan dengan pemberdayaan yang didefinisikan oleh Ife, Jim, dan Tesoriero bahwa pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat menentukan masa depan dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan individu.²³ Masyarakat bukan hanya sebagai objek penerima bantuan, melainkan juga menjadi pelaku atau subjek yang menentukan keberhasilan atau tidaknya suatu program pemberdayaan

²¹ Muhammad Alhada Fuadilah Habib, “Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif”, Jurnal Ar Rehla volume 1 no.2, 2021, hlm 3.

²² Rima Fitria, Skripsi: “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Keterampilan Dalam Membangun Kemandirian di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) Jakarta Selatan”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2020), hlm 29.

²³ Afriansyah, dkk, *Op. cit*, hlm 14.

tersebut. Masyarakat dalam program pemberdayaan memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam menjalankan, mengendalikan, hingga memanfaatkan hasil dari program tersebut. Sesuai pernyataan bahwa program pemberdayaan ini menjadikan masyarakat sebagai subjek, maka dalam pemberdayaan ini, harus dikonsepskan agar tidak hanya membuat masyarakat menjadi tergantung pada program pemberian, karena apapun yang dimilikinya haruslah dihasilkan atas jerih payahnya sendiri yang kemudian hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

Peran pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbaikan kelembagaan, melalui kegiatan pemberdayaan maka diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan.
2. Perbaikan usaha, pemberdayaan diharapkan dapat memperbaiki meningkatkan bisnis setiap anggota agar tidak hanya bermanfaat untuk anggota masyarakat, tetapi juga untuk lingkungan sekitarnya.
3. Perbaikan pendapatan, dalam hal ini pemberdayaan tidak hanya meningkatkan kemampuan dan kualitas berbisnis anggota, melainkan juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan keuangan oleh masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan, dengan pendapatan yang semakin baik, maka diharapkan lingkungan fisik dan sosial di sekitar anggota tersebut dapat membaik. Hal ini karena biasanya lingkungan fisik dan sosial rusak karena kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan kehidupan, pendapatan dan lingkungan yang semakin baik akan mendorong pada peningkatan standar hidup masyarakat.

Dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat.

6. Perbaikan masyarakat, jika setiap anggota telah memiliki kehidupan yang baik, maka akan menyumbang kehidupan yang lebih baik pula dalam masyarakat yang lebih luas.

Kemudian, dalam hal indikator keberhasilan, setidaknya menurut Sumodiningrat terdapat lima indikator keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.²⁴ Kelima hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk miskin berkurang
2. Berkembangnya usaha ditandai dengan meningkatnya pendapatan melalui usaha-usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatnya rasa peduli masyarakat terkait kesejahteraan keluarga miskin di sekitarnya
4. Kemandirian individu dan kelompok yang semakin meningkat, ditandai dengan berkembangnya usaha produktif anggota kelompok dan permodalan kelompok yang semakin kuat
5. Kapasitas atau kemampuan dalam diri masyarakat semakin meningkat dan pendapatan yang merata. Ini ditandai dengan peningkatan pendapatan dan mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan sosial dasar masyarakat.

²⁴ Abang Suriyanto, *Op.Cit.* hlm 6.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dalam diri masyarakat. Melalui pemberdayaan ini, masyarakat diharapkan memiliki kemandirian dan nilai jual dalam dirinya yang mampu meningkatkan daya saingnya dalam masyarakat. Kemandirian tersebut tidak hanya dilihat melalui kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga dilihat dari partisipasi mereka dalam masyarakat. Selain itu, juga dengan kesadaran mereka akan pentingnya peningkatan taraf hidup dan meningkatkan kondisi lingkungan di sekitarnya menjadi lebih baik.

1.6.3 Teori Kontrol Sosial

Dalam hal perilaku menyimpang, terdapat teori kontrol sosial yang dicetuskan oleh Travis Hirschi. Teori kontrol sosial menyatakan bahwasanya adanya perilaku menyimpang dalam masyarakat didasari atas adanya kekosongan kontrol atau pengendalian sosial, karena sejatinya manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum. Dalam teori kontrol sosial, penyimpangan, termasuk didalamnya kriminalitas menjadi penyebab atas kegagalan dari kelompok-kelompok sosial untuk tetap konform, termasuk didalamnya keluarga, pemerintah, lembaga atau institusi dalam masyarakat, dan kelompok-kelompok dominan lainnya. Padahal, institusi berperan untuk menekan perilaku menyimpang yang ada dalam masyarakat, melalui adanya penekanan dan penanaman nilai-nilai positif dalam masyarakat. Teori kontrol sosial Hirschi

sependapat dengan Durkheim. Bahwasanya tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang moral atau kesusilaan.²⁵

Pada dasarnya, teori ini bertolak dari asumsi bahwasanya individu dalam masyarakat sebenarnya memiliki kecenderungan yang sama untuk melakukan kejahatan ataupun menjadi baik. Perbedaan ini bergantung pada masyarakatnya. Jika masyarakatnya menjadi baik, maka individu tersebutpun akan berlaku demikian dan begitu sebaliknya. Asumsi tersebut kemudian mengarah pada pertanyaan dasar, bahwa paham ini berkaitan dengan unsur-unsur apa yang menjadi pencegah seseorang berperilaku demikian di kalangan anggota kelompok tersebut. Hirschi kemudian menyimpulkan bahwa mereka yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan memiliki ikatan sosial yang lemah dalam kelompoknya.²⁶ Ikatan sosial dapat dimaknai sebagai gambaran ikatan pribadi atau ikatan hubungan, meliputi keakraban, persahabatan, berbagi pengalaman, dan berempati dengan lainnya.²⁷ Gottfredson dan Hirschi (1990) mengklaim teori mereka ini dapat menjelaskan semua kejahatan yang dilakukan oleh semua orang.²⁸

Artinya, masyarakat pada umumnya berperilaku sesuai atau berpedoman pada institusi yang mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat. Contohnya,

²⁵ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, volume 1, (Bandar Lampung: AURA CV Anugrah Utama Raharja: 2018), hlm 107.

²⁶ Brian Ferodek, "Control Theory", Open Oregon Educational Resourcer: Introduction to The American Criminal Justice System.

²⁷ Naili Farida, "Pengaruh Ikatan Finansial, Sosial, dan Struktural terhadap Loyalitas nasabah Dimensi Variabel Corporate Image (Studi Kasus Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Undip Semarang)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, vol. 40, No. 1, 2012, hlm 3.

²⁸ Brian Ferodek, Loc.Cit.

perilaku di ruang kelas berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku sesuai institusi bidang pendidikan, perilaku di pasar berpedoman pada aturan-aturan institusi ekonomi, perilaku dalam konteks-konteks lainnya tentunya memiliki pedoman dalam pelaksanaannya. Tidak terkecuali pada pemberdayaan masyarakat, yang tentunya memiliki pedoman dalam pelaksanaannya, yakni berpegang pada nilai-nilai institusi yang melaksanakan program tersebut. Misalnya, menjalankan atau merealisasikan ilmu-ilmu yang telah diberikan dalam program tersebut, memanfaatkan bantuan dengan benar sebagaimana mestinya, berperilaku jujur, dan lainnya. Berperilaku yang tidak sesuai dengan pedoman dalam masyarakat disebut juga sebagai perilaku menyimpang.

Teori kontrol sosial Hirschi mendefinisikan empat elemen ikatan sosial, yang mana keempat elemen ini memiliki keterkaitan dengan pembuatan keputusan individu dalam berperilaku menyimpang atau tidak. Keempat elemen tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Attachment* atau keterlibatan, elemen ini mengacu pada kemampuan individu untuk melibatkan diri dengan individu lain. Keterlibatan yang kuat pada individu mendorong dirinya untuk membentuk kepekaan terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain.

Attachment ini tidak hanya berupa keterlibatan, tapi bagaimana keterhubungan emosional antara individu dengan individu lain terbentuk, melahirkan suatu kontrol yang tidak langsung diantara keduanya.

b. *Commitment* atau keterikatan seseorang atau kesungguhan seseorang pada subsistem konvensional, seperti lembaga, sekolah, organisasi, dan sebagainya. Orang berkomitmen untuk menginvestasikan waktu, energi, dan tenaga mereka pada perilaku-perilaku yang diharapkan. Jika individu berkomitmen pada konformitas, yakni kecenderungan untuk menyesuaikan sikap dan perilaku agar sesuai dengan norma-norma kelompok, maka tindakan dan keputusan individu tersebut akan mencerminkan komitmen tersebut. Sehingga komitmen juga dapat berupa kesadaran dan keyakinan yang kuat untuk taat pada aturan. Hal ini karena komitmen menunjukkan bahwa perilaku menyimpang yang mereka lakukan akan berdampak pada masa depan mereka karena merugikan orang lain dan diri sendiri.

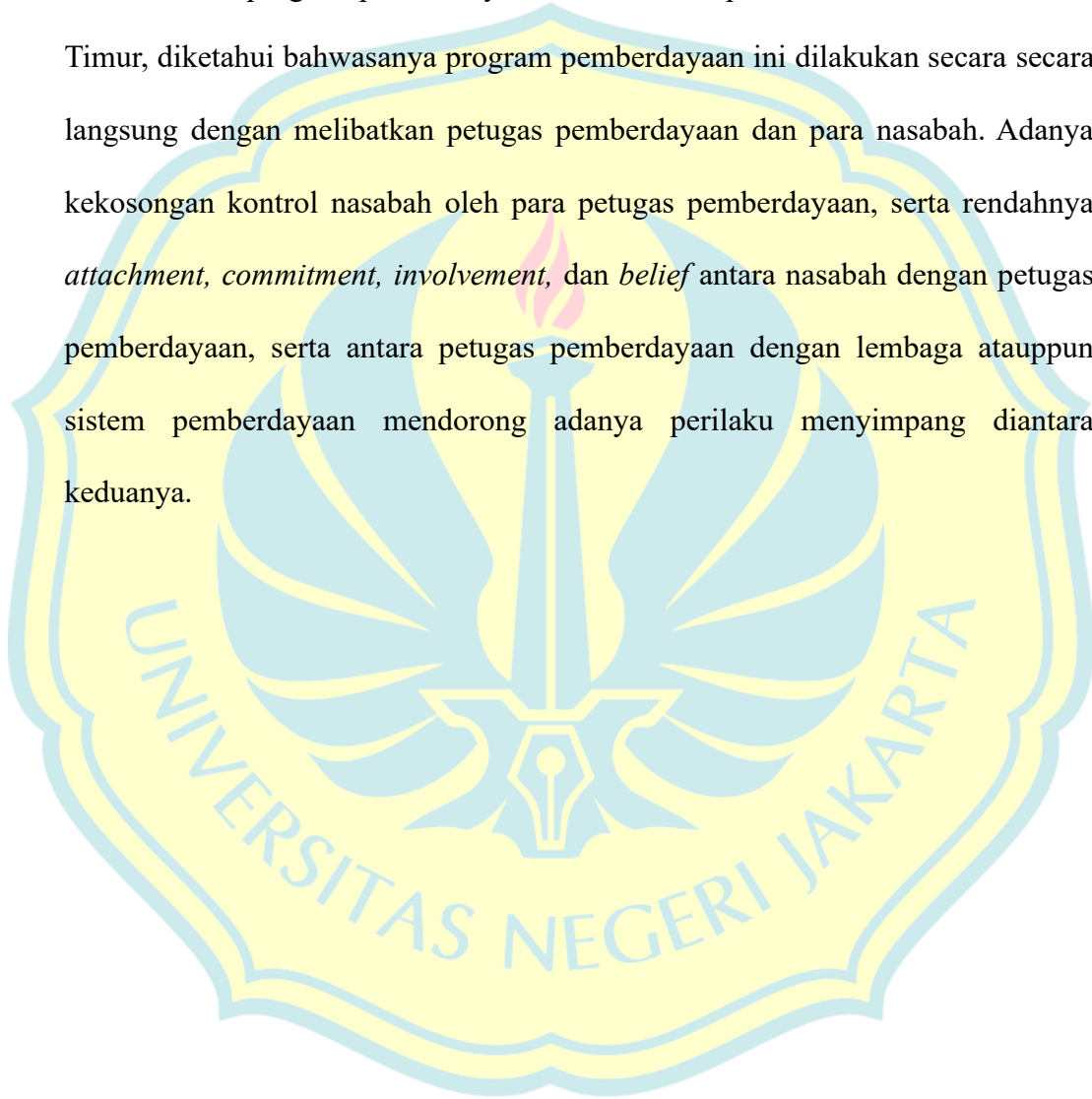
c. *Involvement* atau keterlibatan ini berkaitan dengan *commitment*, bahwa kesadaran tersebut mendorong individu untuk melakukan tindakan partisipatif dan terlibat dalam ketentuan-ketentuan yang ada di masyarakat. Dengan terlibat dalam aktivitas yang positif, maka akan mengurangi peluang seseorang untuk berperilaku menyimpang.

d. *Belief* atau kepercayaan individu pada kepercayaan individu terkait norma-norma atau aturan yang diberlakukan. Semakin seseorang percaya pada aturan yang ada, maka semakin kecil kemungkinan seseorang tersebut untuk berperilaku menyimpang,

Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori ini menganalisis adanya perilaku menyimpang yang ada pada individu didasari karena adanya kekosongan kontrol

dalam elemen masyarakat tersebut yang kemudian juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya intensitas setiap elemen dalam individu.

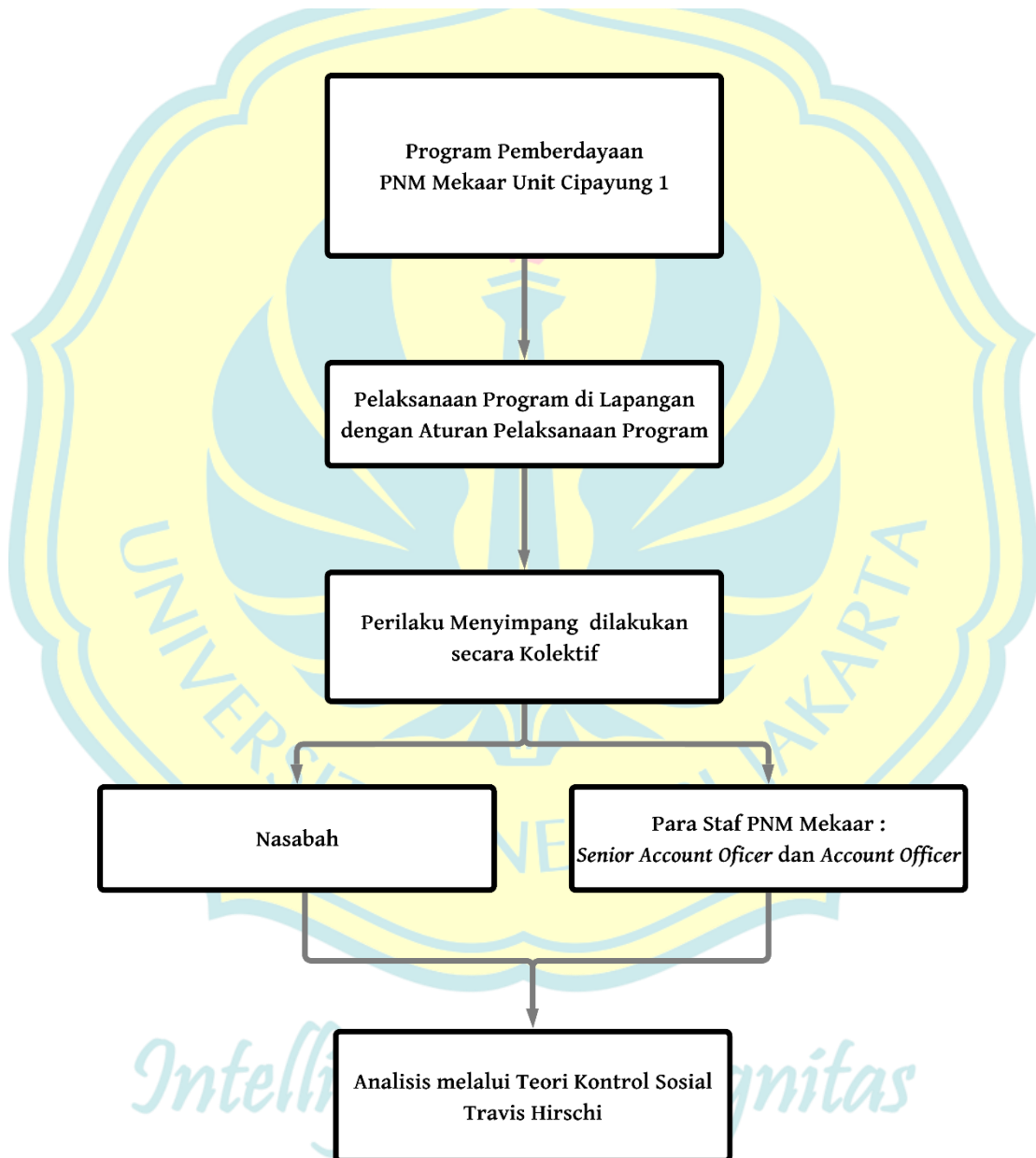
Dalam program pemberdayaan PNM Mekaar pada salah satu unit di Jakarta Timur, diketahui bahwasanya program pemberdayaan ini dilakukan secara langsung dengan melibatkan petugas pemberdayaan dan para nasabah. Adanya kekosongan kontrol nasabah oleh para petugas pemberdayaan, serta rendahnya *attachment, commitment, involvement*, dan *belief* antara nasabah dengan petugas pemberdayaan, serta antara petugas pemberdayaan dengan lembaga ataupun sistem pemberdayaan mendorong adanya perilaku menyimpang diantara keduanya.



Intelligentia - Dignitas

Adapun hubungan antar konsep dalam penelitian ini dapat dicermati sebagai berikut:

Skema 1.2
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Pendekatan ini membantu peneliti untuk menjelaskan mengenai kehidupan seseorang, perilaku, fungsi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbal balik. Penggunaan pendekatan kualitatif juga didasari atas kebutuhan penelitian yang bertujuan untuk memahami makna atas data-data yang telah diperoleh dan memahami kekompleksan atas interaksi tertentu yang hanya dapat diuraikan melalui penelitian kualitatif.²⁹ Hal itu sesuai dengan fokus dan tujuan peneliti, yakni untuk mencari tahu dan mendeskripsikan lebih dalam atas adanya penyalahgunaan dana. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti akan menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data yang relevan dengan penelitian ini. Teknik tersebut meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.7.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian diperlukan untuk menggali dan melengkapi informasi mengenai fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya melibatkan petugas atau *Account Officer* PNM Mekaar, *Senior Account Officer* PNM Mekaar, Ketua Unit Mekaar, beberapa nasabah PNM Mekaar tingkat unit di Jakarta Timur, serta beberapa

²⁹ John Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches" vol.3, (New Delhi: Sage Publication: 2009)

masyarakat Jakarta Timur. Dalam penelitian ini, total informannya adalah 15 informan. Kemudian, informan utama dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, yang merupakan 3 *Account Officer*, 2 *Senior Account Officer*, 1 Ketua Unit Mekaar, dan 5 orang nasabah PNM Mekaar. Sementara 4 informan lainnya adalah informan pendukung, yakni 3 orang masyarakat Kota Jakarta Timur yang bukan nasabah PNM Mekaar dan 1 orang pelaku UMKM yang tidak menjadi bagian dari program PNM Mekaar. Pemilihan informan tersebut didasarkan atas dasar penilaian bahwa para informan terlibat langsung serta mengetahui secara mendalam berbagai informasi yang terkait program PNM Mekaar yang berada di Kota Jakarta Timur. Untuk dapat diketahui lebih lanjut mengenai subjek penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Tabel Informan

No.	Tipe Informan	Nama Informan	Posisi Subjek Penelitian	Pekerjaan dan Usia	Cakupan Data
1.	Informan Utama	IR	Ketua Unit Mekaar	Ketua Unit Mekaar 30 tahun.	Informasi umum mengenai PNM Mekaar.
2.		YL	<i>Senior Account Officer</i> PNM Mekaar	Pegawai PNM Mekaar Tingkat Unit	Implementasi PNM Mekaar di dalam hal pelaksanaan dan pengawasan program.
3.		ND	<i>Senior Account Officer</i> PNM Mekaar		
4.		AR	<i>Account Officer</i> PNM Mekaar		Implementasi PNM Mekaar, terutama dalam hal pelaksanaan pencairan dana

No.	Tipe Informan	Nama Informan	Posisi Subjek Penelitian	Pekerjaan dan Usia	Cakupan Data
5.		AD	Account Officer PNM Mekaar		dan penagihan angsuran.
6.		LL	Account Officer PNM Mekaar		
7.		RR	Nasabah PNM Mekaar	Ibu Rumah Tangga (29 tahun)	Informasi mengenai pelaksanaan program, dimulai dari pendaftaran, pencairan, penggunaan dana, hingga angsuran dana.
8.		AR		Ibu Rumah Tangga (29 tahun)	
9.		NN		Ibu Rumah Tangga (51 tahun)	
10.		II		Ibu Rumah Tangga (42 tahun)	
11.		NV		Wirausahawan (41 tahun)	
12.	Informan Pendukung	ZB	Masyarakat Kota Jakarta Timur bukan nasabah	Pelaku Wirausaha (42 tahun)	Informasi mengenai tanggapan atas program PNM Mekaar di Jakarta Timur
13.		IT		Ibu Rumah Tangga (58 tahun)	
14.		ON		Pramu kantor (50 tahun)	
15.		AJ		Ketua RT (43 tahun)	

Sumber: Data diolah Peneliti, 20225

1.7.3 Peran Peneliti

Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai pengumpul data secara langsung.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti berperan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diidentifikasi dan dianalisis untuk menjadi hasil penelitian. Peneliti akan terlibat secara langsung dalam mengambil data, menganalisis dan mendeskripsikan hasil temuan, serta menyimpulkan hasil temuan penelitian untuk kemudian dituliskan dalam laporan, sehingga peneliti perlu membangun dan menjaga hubungan baik selama penelitian dilakukan.

³⁰ Dr. Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif" vol.1, (Bandung: CV. Harfa Creative: 2023).

Keterlibatan secara langsung oleh peneliti, yakni melalui observasi atau turun langsung ke lapangan dan wawancara untuk mendapatkan informasi menjadi sebuah bentuk kevaliditasan atas informasi atau data yang diperoleh oleh peneliti untuk penelitian ini.

1.7.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jakarta Timur, tepatnya di salah satu kecamatan di Jakarta Timur. Peneliti memilih lokasi penelitian berdasarkan adanya fenomena bahwa terdapat perilaku-perilaku menyimpang dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi yang diinisiasikan oleh PNM, khususnya dalam program PNM Mekaar pada tingkat unit. Fenomena ini memiliki urgensi untuk diteliti lantaran terjadi kompleksitas yang cukup rumit. Hal yang paling utama adalah adanya fakta bahwa metode peminjaman uang ini, bukan untuk modal usaha melainkan untuk biaya lainnya dan diketahui oleh petugas PNM Mekaar atau *account officer* PNM Mekaar. Pemilihan unit dalam penelitian ini didasari atas fakta bahwa unit ini termasuk unit tua yang sudah beroperasi sejak pertama kali PNM Mekaar berdiri. Dapat dikatakan unit ini termasuk dalam unit pertama hasil pemekaran dari unit pusat. Oleh karena sudah berdiri dengan cukup lama, unit ini menjadi salah satu unit dengan nasabah terbanyak hingga harus mengalami pemekaran unit. Dengan demikian, adanya kejanggalan-kejanggalan dalam praktik di PNM Mekaar pada salah satu tingkat unit di Jakarta Timur ini sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2025.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Oleh karena itu, peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian ini. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yakni sebagai berikut:

1.7.5.1 Observasi

Observasi adalah salah satu langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat mengamati fenomena-fenomena yang tengah diselidiki. Observasi membantu peneliti untuk memperoleh data diluar persepsi-persepsi responden, sehingga data penelitian akan lebih komprehensif.³¹ Melalui observasi peneliti dapat merasakan situasi sosial yang terjadi di ranah penelitian. Aspek yang diamati diantaranya adalah para aktor yang terlibat dalam proses peminjaman dana ini, yakni para nasabah dan penanggung jawab atau *account officer* dari PNM Mekaar. Observasi membantu peneliti dalam memahami proses yang terjadi dan peranan setiap aktor dalam proses transaksi yang terjadi. Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan dan memaknai fakta-fakta di lapangan yang tidak diperoleh melalui wawancara terstruktur dalam penelitian.

³¹ Prof Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, vol 1, (Bandung: Penerbit Alfabeta: 2022), hlm 226.

1.7.5.2 Wawancara

Wawancara, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada informan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan wawancara yang akan ditanyakan kepada informan secara langsung. Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yakni peneliti akan melakukan wawancara dengan mengacu kepada pedoman yang telah dibuat dan dipersiapkan. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur dilakukan melalui diskusi-diskusi dengan para narasumber. Wawancara bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang perilaku-perilaku menyimpang yang terdapat di PNM Mekaar yang dilakukan oleh beberapa penerima manfaat serta para petugas yang terlibat dalam salah satu unit PNM Mekaar di Jakarta Timur.

1.7.5.1 Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan sebagai pelengkap dari metode wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dalam melakukan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, peneliti menggunakan dokumen tulisan dari literatur sejenis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa rekaman gambar ketika terjadi pinjaman antara petugas PNM Mekaar dan

nasabah, berkas-berkas bukti peminjaman oleh nasabah PNM Mekaar, dan hal-hal pendukung penelitian lainnya.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dimaknai sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan didokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, hingga membuat kesimpulan agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data yang mengacu pada model Miles dan Huberman, yakni data dianalisis secara interaktif dan dilakukan secara terus-menerus hingga data tersebut jenuh.³² Tahapan analisis data dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Dalam penelitian ini, data-data baik data primer maupun data sekunder, yang telah diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi akan direduksi. Reduksi data dalam penelitian ini diperlukan karena informasi yang diterima masih bersifat kompleks, rumit, dan belum bermakna. Proses reduksi data dilakukan secara terperinci, yakni dengan cara merangkum dan memfokuskan pada hal-hal pokok, sehingga diperoleh data yang akan mendukung hasil penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh

³² Ibid, hlm 246.

akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan apabila dibutuhkan.

2. Penyajian data

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menguraikannya secara naratif, berbentuk uraian singkat. Dalam membantu memahami uraian-uraian yang disampaikan, penyajian data juga dapat dibantu dengan menuangkannya secara sederhana dan terkonsep dalam bentuk bagan, grafik, matriks, dan diagram. Dalam penelitian ini akan penguraian data terbagi menjadi beberapa sub bab dalam setiap babnya. Beberapa data juga turut disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pendeskripsian.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, kesimpulan awal masih bersifat sementara dan memungkinkan berubah apabila dalam proses pengumpulan data terdapat bukti-bukti yang tidak mendukung proses pengambilan kesimpulan tersebut. Namun, dalam proses penarikan kesimpulan ini, apabila pada tahap awal didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, maka dapat dikatakan kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

Dalam penelitian ini, data-data baik data primer maupun data sekunder, yang telah diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi akan direduksi. Proses reduksi data dilakukan secara terperinci, melalui merangkum, memfokuskan pada

hal-hal pokok. Kemudian data akan disajikan dengan membuat uraian serta tabel jika diperlukan, hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

1.7.7 Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi dilakukan untuk memeriksa kebenaran hasil temuan yang diperoleh dengan melakukan klarifikasi kepada pihak lain. Triangulasi data terbagi menjadi tiga jenis, yakni triangulasi sumber, teknik dan waktu. Pada penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi data berupa triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh. Triangulasi sumber dilakukan dengan mencari data atau informasi tambahan lebih dari satu sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi untuk memastikan kebenarannya. Pada penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi data kepada pihak lembaga pengawasan keuangan di Jakarta dan masyarakat di Jakarta Timur yang tidak menjadi nasabah PNM Mekaar tingkat unit. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya peneliti untuk menjangkau sumber-sumber yang dianggap dapat membuat hasil penelitian ini memiliki kredibilitas.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat sebagai kerangka dalam menyusun penelitian dan memberikan petunjuk mengenai isi dari pembahasan setiap babnya dalam penelitian ini, Penulisan pada penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu BAB I yang berisikan pendahuluan, BAB II dan BAB III akan menguraikan hasil temuan

secara empiris, BAB VI berisikan analisis hasil temuan, dan BAB V kesimpulan.

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Bab ini berisikan uraian latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan literatur, kerangka konsep, dan metodologi penelitian.

BAB II : Bab ini memaparkan uraian gambaran umum mengenai subjek dan objek penelitian. Peneliti akan menguraikan profil PT PNM, salah satu tingkat unit PNM Mekaar di Jakarta Timur serta konteks sosial pada wilayah Jakarta Timur. Pada bab ini pula, penulis akan menguraikan profil pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi peminjaman dana, baik dari sisi petugas PNM Mekaar maupun dari sisi nasabah PNM Mekaar tingkat unit.

BAB III: Bab ini memaparkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam bab ini, peneliti menguraikan implementasi program PNM Mekaar serta mendeskripsikan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para nasabah dan petugas PNM Mekaar, kesenjangan antara tujuan dengan fakta yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan program, serta masalah-masalah yang timbul atas keterlibatan dalam program ini.

BAB IV : Bab ini akan memaparkan mengenai hasil temuan yang dianalisis dengan teori dan konsep yang telah dipaparkan pada sub kerangka konseptual.

BAB V : Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yakni berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan pada permasalahan penelitian.



Intelligentia - Dignitas